



# PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU KADA 2024 DI PROVINSI LAMPUNG

Suci Lestari<sup>1\*</sup>Kiki Fitriani Ali Zen<sup>2</sup> 

<sup>1,2</sup> Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received Oct 16, 2024

Revised Dec 12, 2024

Accepted Dec 29, 2024

Available online Jan 31, 2024

### Kata Kunci :

Women's Political Participation in the 2024 Elections (Regional Head Elections) in Lampung Province

### Keywords:

Women's Political Participation, Women's Representation, Elections, Lampung



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2024 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi dan keterwakilan politik perempuan pada pemilu tahun 2024 di Provinsi Lampung. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus pada literatur dari sumber resmi, seperti lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga penelitian. Teori partisipasi politik perempuan menyoroti pentingnya keterlibatan aktif dalam politik untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan bahwa kepentingan perempuan terwakili dalam kebijakan publik. Sebaliknya, teori perwakilan Hanna Pitkin menekankan perlunya keselarasan antara demografi masyarakat dan keterwakilan politik. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Lampung mengalami stagnasi, jauh di bawah target kuota nasional, yang mencerminkan tren stagnasi partisipasi yang mungkin menurun jika tantangan-tantangan yang ada tidak diatasi. Keterlibatan perempuan dalam politik juga terhambat oleh dominasi laki-laki dalam struktur partai. Faktor penghambatnya antara lain norma sosial budaya, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan informasi politik, serta kurangnya kesempatan dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan peran perempuan dalam politik lokal dan mendorong keterlibatan politik mereka.

## ABSTRACT

This study aims to analyze women's **political participation** and **representation** in the **2024 elections in Lampung Province**. A **qualitative descriptive methodology** was used, focusing on literature from official sources, such as government agencies, NGOs, and research institutions. **The theory of women's political participation** highlights the importance of **active involvement** in politics to achieve **gender equality** and ensure that women's interests are represented in **public policy**. Conversely, **representative theory** by Hanna Pitkin emphasizes the need for alignment between **societal demographics** and political representation. The findings indicate that **women's representation** in Lampung is **stagnating**, significantly below **the national quota target**, reflecting a stagnant participation trend that may decline if existing challenges are not addressed. Women's involvement in politics is also hindered by **male dominance** within **party structures**. Inhibiting factors include **socio-cultural norms**, limited **access to education** and **political information**, and a lack of **opportunities and resources**. This research aims to enhance understanding of **women's rights and roles** in local politics and encourage their **political engagement**.

\*Corresponding author.

E-mail addresses: E-mail: [lesstariisucii@gmail.com](mailto:lesstariisucii@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan publik. Keterlibatan ini sangat krusial dalam masyarakat demokratis dan merupakan pilar utama untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan aspirasi rakyat (Hariyanti et al., 2018). Melalui partisipasi politik, warga negara dapat menyampaikan kepentingan dan pandangan mereka, sekaligus memberikan legitimasi kepada proses politik dan pemimpin yang terpilih. Meskipun partisipasi politik sangat penting bagi kelangsungan demokrasi, terdapat perdebatan mengenai peran perempuan dalam politik, terutama dalam konteks pemilihan umum. Di satu sisi, partisipasi perempuan dianggap penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan. Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa keterlibatan perempuan bukanlah prioritas utama dalam politik (Fitriyah, 2020). Dinamika ini menimbulkan tantangan bagi partisipasi politik perempuan, terutama dalam hal dukungan dan pengakuan selama pemilu.

Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang paling dikenal, dan perhatian terhadap partisipasi perempuan dalam politik semakin meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks pemilu di Indonesia, partisipasi perempuan menjadi topik penting dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan representasi. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan, baik sebagai pemilih, aktivis, maupun calon legislatif, mengakibatkan kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik, yang seringkali berimbas pada kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik—melalui pemilu, gerakan sosial, atau organisasi politik—dianggap dapat meningkatkan jumlah perempuan terpilih dan mempengaruhi agenda politik agar lebih inklusif terhadap isu-isu yang relevan bagi perempuan. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam pemilu dapat memperbaiki kualitas representasi politik dengan menciptakan keanekaragaman yang lebih baik di lembaga-lembaga politik lokal (Haquri & Sahab, 2023).

Dari sini, hubungan antara partisipasi politik dan keterwakilan perempuan menjadi jelas. Teori Hanna Pitkin mengenai representasi menjelaskan dua dimensi penting, yakni representasi deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan pentingnya jumlah perempuan dalam lembaga politik yang mencerminkan proporsi demografis perempuan di masyarakat. Teori ini menunjukkan bahwa semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik, baik sebagai pemilih maupun kandidat, semakin besar kemungkinan kepentingan mereka terwakili (Dovi, 2015). Dengan demikian, partisipasi perempuan dalam pemilu, kampanye, dan organisasi politik berpotensi meningkatkan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebaliknya, representasi substantif menekankan bahwa keterwakilan perempuan harus memperjuangkan kebijakan dan kepentingan yang relevan bagi mereka, seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Dovi, 2015). Dalam konteks ini, partisipasi yang lebih besar di tingkat akar rumput dapat mendorong keterwakilan substantif, di mana perempuan dalam posisi kekuasaan lebih cenderung memprioritaskan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Sejak diberlakukannya Pasal 28 E Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, perempuan di Indonesia telah memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun, keterwakilan perempuan dalam politik masih belum sebanding dengan jumlah mereka dalam populasi (Haquri & Sahab, 2023). Pada tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-116 dari 193 negara dalam hal representasi perempuan di parlemen (Rasyidin & Aruni, 2020), jauh dari standar yang diharapkan dalam sistem demokrasi modern. Salah satu penyebab utama minimnya representasi perempuan dalam politik adalah budaya patriarki yang kuat, yang menimbulkan stereotip negatif tentang perempuan di arena politik (Haquri & Sahab, 2023). Selain itu, tingkat

pendidikan dan kesadaran politik juga menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan.

Stereotip bahwa perempuan dianggap kurang kompeten atau tidak layak untuk berpolitik sering kali menghalangi mereka mendapatkan dukungan dalam diskusi politik. Beberapa penentang partisipasi perempuan berargumen bahwa kesetaraan gender bukanlah alasan utama untuk mendorong keterlibatan perempuan, melainkan bahwa fokus seharusnya pada keahlian dan kompetensi individu. Memilih seseorang berdasarkan jenis kelamin tidak selalu menjamin kualitas dan efektivitas pemerintahan (Purwanti & Setiawan, 2020). Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa penekanan pada partisipasi perempuan dapat mengalihkan perhatian dari isu-isu mendesak lainnya seperti perekonomian (Pinilih, 2020). Beberapa elit politik menolak kuota untuk perempuan dalam perwakilan politik dan lebih memilih sistem meritokrasi yang menekankan kualifikasi dan kemampuan (Perdana & Hillman, 2020). Kuota dianggap dapat merugikan perempuan yang terpilih karena dianggap memenuhi kewajiban kuota, bukan berdasarkan kemampuan sejati. Dengan demikian, memaksakan keterwakilan perempuan dalam politik bisa dipandang sebagai bentuk diskriminasi positif yang tidak meratakan persaingan antar kandidat.

Di sisi lain, perspektif feminis menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam politik untuk mencapai kesetaraan gender dan perubahan sosial (Sutrisno & Salsabela, 2023). Menurut pandangan feminis, perspektif dan pengalaman perempuan sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan politik, yang mengakibatkan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan mereka (UNDP, 2018). Keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan dan pengalaman beragam masyarakat. Dengan melibatkan perempuan dalam kepemimpinan politik, negara dapat memanfaatkan perspektif yang lebih luas, yang pada gilirannya menghasilkan tata kelola yang lebih efektif. Hal ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang lebih baik dalam menangani isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, hak reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi. Kehadiran perempuan dalam politik juga menjadi simbol bagi generasi muda, mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik dan mengambil peran kepemimpinan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, khususnya dalam konteks pemilu. Studi oleh Jones dan Smith mengungkapkan bahwa peningkatan keterwakilan perempuan berkontribusi pada kebijakan yang lebih inklusif dan tata kelola yang lebih baik (Wibowo, 2021). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan lokal secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dapat memperkaya pengambilan keputusan, memastikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, termasuk perempuan dan kelompok marginal, dipertimbangkan (Iqbal & Kurniawan, 2020; Ramli & Elatrash, 2021; Suhenty, 2022). Keterlibatan perempuan dalam pemilu lokal juga meningkatkan kualitas representasi politik dengan mencerminkan keanekaragaman masyarakat dalam lembaga-lembaga politik (Haquri & Sahab, 2023). Oleh karena itu, mendorong partisipasi politik perempuan dalam pemilu lokal adalah langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik serta memperkuat demokrasi lokal dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Partisipasi politik perempuan dalam konteks pemilu merupakan elemen penting yang mempengaruhi dinamika politik dan pembangunan (Asrida et al., 2013). Keterlibatan ini sangat berperan dalam mengadvokasi isu-isu terkait kepentingan perempuan, termasuk kesetaraan gender dan kesejahteraan, serta dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Keterlibatan perempuan dalam politik lokal dapat membawa perubahan dalam gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kajian mengenai partisipasi politik perempuan menjadi sangat relevan dalam konteks pemilu di Provinsi Lampung.

## **METODE PENELITIAN**

Provinsi Lampung memiliki sejarah panjang terkait dinamika politik lokal, dan peran perempuan dalam pemilihan umum telah menjadi fokus perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren partisipasi politik perempuan dalam konteks pemilu di Provinsi Lampung menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi literatur dari sumber resmi seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga riset. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan peran perempuan dalam politik lokal, serta memotivasi perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam aktivitas politik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks perubahan global yang menekankan kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan tidak hanya penting, tetapi juga esensial untuk membangun masyarakat yang adil dan beradab. Partisipasi ini menjadi fokus yang signifikan dalam diskusi pemilu, yang merupakan proses politik krusial dalam otonomi daerah. Pemilu melibatkan komunikasi dan pembentukan opini di antara berbagai aktor politik, media, dan masyarakat (Aziz, 2019). Namun, kesetaraan gender dalam ruang publik di Indonesia masih menjadi perdebatan, dengan hak-hak perempuan dalam politik belum terpecahkan secara jelas.

Perilaku perempuan dalam politik menunjukkan kurangnya ambisi, sementara partai politik juga kurang berkomitmen dalam memberikan ruang bagi perempuan. Realitas ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi di politik. Kurangnya dukungan politik dan peluang yang terbatas, ditambah dengan budaya patriarki yang mengakar kuat dalam struktur sosial-politik Indonesia, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung partisipasi perempuan. Dalam pandangan feminisme, ini adalah dinamika kekuasaan gender dalam konteks politik dan sosial (P. Lestari et al., 2021). Oleh karena itu, transformasi budaya menjadi penting untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap partisipasi politik perempuan. Perubahan dalam norma dan praktik yang mendukung ketidaksetaraan gender dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang memberdayakan perempuan serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam politik.

Perempuan sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial yang menekankan peran tradisional mereka di rumah, yang dapat menghambat aspirasi politik mereka (L. Lestari et al., 2023). Partai politik sebagai institusi yang berpengaruh sering kali tidak memberikan ruang yang cukup bagi perempuan, mencerminkan ketidaksetaraan gender yang masih ada dalam sistem politik Indonesia. Hanya ada satu perempuan yang pernah menduduki jabatan politik tertinggi di Indonesia, Megawati Soekarnoputri, yang menunjukkan tantangan besar yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi penting (Taryana & Pasaribu, 2023) (L. Lestari et al., 2023). Meskipun demikian, perempuan perlahan-lahan mengambil peran penting dalam politik, meski proporsinya masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Representasi perempuan dalam politik telah berfluktuasi sejak tahun 1950. Tingkat terendah terjadi antara 1950 dan 1995, dengan peningkatan yang terlihat setelahnya, mencapai puncaknya antara 2009 dan 2014 dengan 100 anggota perempuan di parlemen, sebelum turun menjadi 97 pada 2014 hingga 2019 (Bahtiar et al., 2021). Peningkatan ini berkat upaya dari aktivis dan anggota parlemen perempuan dalam mendorong partisipasi politik perempuan.

Provinsi Lampung, seperti daerah lain di Indonesia, juga menghadapi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dalam politik. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil langkah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan melalui berbagai program dan kebijakan yang menargetkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan. Mereka

berkomitmen untuk mencapai tujuan kelima Sustainable Development Goals (SDGs) tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2030 (Husein et al., 2021). Ini termasuk enam target, seperti mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi (LPPM Unila, 2019). Namun, tantangan tetap besar bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam politik lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta Puslitbang Wanita, Anak, dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (2019) menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Lampung pada tahun 2018 masih 90,57%, hanya meningkat 0,08% dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa percepatan pembangunan untuk perempuan masih lambat dibandingkan laki-laki. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang menilai partisipasi perempuan dalam parlemen, kontribusi upah, dan jumlah perempuan dalam tenaga kerja profesional, menunjukkan stagnasi dari tahun 2016 (62,01) ke 2018 (63,60). Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, termasuk memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik perempuan dalam pemilu adalah upaya penting untuk mencapai keterlibatan politik yang setara antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Namun, partisipasi ini tidak hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas keterlibatan. Perempuan yang terlibat dalam politik tidak selalu memperjuangkan agenda kesetaraan gender, terutama dalam sistem yang patriarkal. Oleh karena itu, hak politik perempuan diatur untuk memberi mereka kesempatan berperan aktif, meskipun belum mencapai kesetaraan penuh dengan hak-hak laki-laki. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan partai untuk mencalonkan minimal 30% perempuan untuk jabatan legislatif (Destemi & Hartati, 2020). Pendidikan politik yang memperhatikan keseimbangan dan kesetaraan gender juga ditekankan dalam UU No. 10 Tahun 2008.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menginisiasi program pendidikan dan pelatihan politik untuk calon perempuan dalam persiapan Pemilu 2018 (LPPM Unila, 2019). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam politik, menciptakan lanskap politik yang lebih seimbang dan inklusif. Pemerintah Provinsi Lampung mendukung kesetaraan gender melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (LPPM Unila, 2019). Lampung juga memiliki gubernur perempuan, seperti Hj. Eva Dwiana, S.E., dan Hj. Chusnunia Chalim, S.H., M.Si., M.Kn., Ph.D., yang diharapkan dapat mendorong lebih banyak partisipasi perempuan dalam politik.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perempuan merupakan mayoritas 51,13% dari total populasi Indonesia pada tahun 2020, sementara laki-laki 48,87% (BPS, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan partisipasi politik perempuan masih rendah. Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional mencatat bahwa pemilih perempuan hanya 49,79%, dibandingkan 50,21% laki-laki (KPU, 2024). Keterwakilan perempuan di lembaga politik formal juga rendah, dengan DPR RI hanya 21,92%, DPRD Provinsi 18,43%, dan DPRD Kabupaten/Kota 19,67%. Ini menunjukkan bahwa amanat keterwakilan 30% perempuan belum tercapai di parlemen, termasuk di Lampung.

Berdasarkan teori representasi deskriptif, yang menyatakan bahwa komposisi demografis wakil politik harus mencerminkan demografi masyarakat, keterwakilan perempuan yang masih di bawah 30% menunjukkan ketidakseimbangan antara populasi perempuan dan peran mereka dalam politik (Dovi, 2015). Meskipun Indonesia menerapkan kuota 30% untuk perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, kenyataannya masih di bawah angka tersebut.

Beberapa faktor, seperti hambatan struktural, patriarki, stereotip gender, kurangnya dukungan finansial, dan akses terbatas ke pendidikan politik, menjadi penyebabnya.

Teori representasi substantif menegaskan bahwa kuota jumlah saja tidak cukup jika perempuan yang terpilih tidak memperjuangkan isu penting bagi perempuan, seperti kesetaraan gender dan hak kesehatan reproduksi (Dovi, 2015). Teori feminisme radikal menunjukkan bahwa sistem politik yang didominasi laki-laki cenderung mengesampingkan perempuan dalam pengambilan keputusan penting. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan melalui kuota, partisipasi politik perempuan secara substantif masih belum tercapai. Peraturan mengenai keterwakilan perempuan akan efektif jika diiringi dengan perubahan struktural yang lebih dalam, termasuk peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor, perubahan budaya politik yang inklusif, serta penguatan kapasitas perempuan untuk memimpin dalam politik. Tanpa upaya tersebut, keterwakilan perempuan di Indonesia akan terus tertinggal meskipun mereka merupakan mayoritas dalam populasi.

**Tabel 1. Presentase Menurut Badan Pusat Statistik (BPS),**

No	Keterangan	Nilai	Sumber/Referensi
1.	Perempuan dalam Populasi Indonesia	51.13%	BPS (2021)
2.	Laki-laki dalam populasi Indonesia	48.87%	BPS (2021)
3.	Pemilih Perempuan (DPT Nasional 2024)	49,29%	KPU( 2024)
4	Pemilih laki-laki (DPT Nasional 2024)	50,21%	KPU (2024)
5	Keterwakilan Perempuan di DPRI	21,92%	BPS (2021)
6.	Keterwakilan perempuan di DPRD provinsi	18,43%	BPS (2021)
7.	Keterwakilan perempuan di DPRD	19.67%	BPS (2021)

	Kabupaten/ Kota		
8.	Target keterwakilan perempuan dalam UU Pemilu No.7	30%	UU Pemilu No.7 (2017)
9.	Indeks Pembangunan Gender (LPG) Lampung( 2018)	90,57%	LPPM Unila( 2019)
10.	Peningkatan LPG Lampung dari 2017 ke 2018	0,08%	LPPM Unila( 2019)
11.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Lampung( 2018)	63,60%	LPPM Unila( 2019)
12.	Pendekatan (IDG) Lampung dari 2016 ke 2018	1,59%	LPPM Unila( 2019)

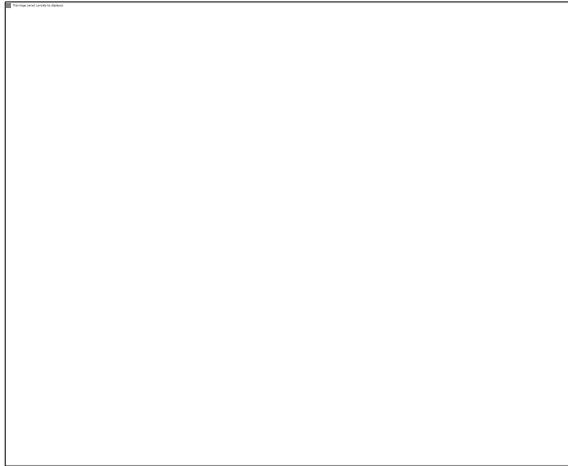
Situasi politik nasional sering kali merefleksikan dinamika yang terjadi di tingkat lokal, termasuk di Provinsi Lampung. Meskipun populasi perempuan di Lampung mengalami pertumbuhan yang signifikan, partisipasi mereka dalam politik masih terbatas. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 9.176.546 jiwa (BPS Lampung, 2023). Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung (2019), 15 kabupaten/kota di provinsi ini memiliki indeks disparitas gender di bawah satu, yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, kecuali di Kota Metro.

Menurut laporan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung (2024), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lampung adalah 6.539.128 jiwa, dengan komposisi 50,86% laki-laki dan 49,16% perempuan. Hal ini menjelaskan mengapa partisipasi politik perempuan di provinsi ini masih terbatas dan belum mencapai target yang diharapkan. Data grafik partisipasi perempuan dalam parlemen di Lampung menunjukkan bahwa tidak ada daerah yang mencapai target 30% keterwakilan perempuan.

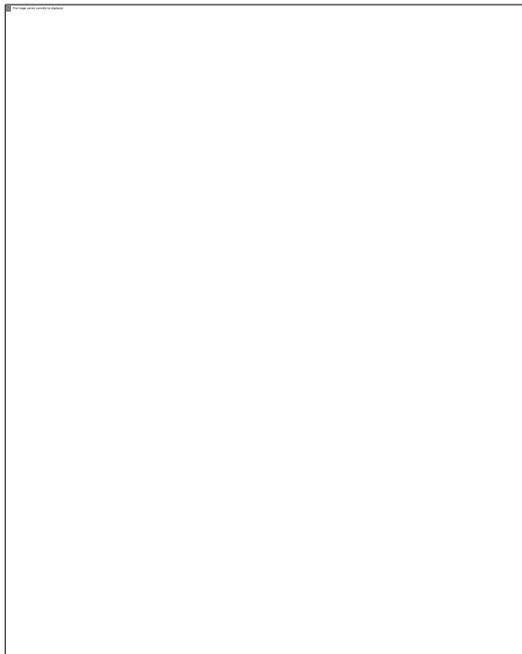
Beberapa daerah menunjukkan peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan, seperti Pesawaran yang naik dari 1,03% pada tahun 2020 menjadi 26,67%. Namun, ada juga penurunan di beberapa daerah, seperti Pringsewu yang turun sebesar 2,5% dan Metro sebesar 4%, sementara di daerah lain terjadi stagnasi. Jumlah perempuan yang duduk di DPRD Lampung saat ini hanya 15-16 dari total 85 kursi (BPS Prov Lampung, 2024), yang masih di bawah kuota

30%. Ini menunjukkan tantangan besar bagi perempuan untuk mengakses kekuasaan politik di tingkat lokal, meskipun populasi mereka signifikan.

**Gambar 1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2020-2022 (persen)**



**Gambar 2. KPU PROVINSI LAMPUNG**



**Tabel 2. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Periode 2019-2024**

Partai Politik	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Partai PDI-Perjuangan	12	7	19
Partai Gerindra	11	1	12
Partai Golongan karya	9	1	10
Partai Demokrat	10	-	10
Partai Nasdem	6	3	9

Partai Kebangkitan Bangsa	5	4	9
Partai Keadilan Sejahtera	9	-	9
Partai Amanat Nasional	7	-	7
Jumlah	69	16	85

**Sumber: Sekretariat DPRD Lampung, (2020)**

**Tabel 3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Lampung Tahun 2024-2029.**

Partai Politik	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Partai PDI-Perjuangan	7	6	13
Partai Gerindra	15	1	16
Partai Golongan karya	9	2	11
Partai Demokrat	9	-	9
Partai Nasdem	6	4	10
Partai Kebangkitan Bangsa	10	1	11
Partai Keadilan Sejahtera	6	1	7
Partai Amanat Nasional	7	1	8
Jumlah	69	16	85

**Sumber: Sekretariat DPRD Lampung, (2020)**

Jumlah perempuan di lembaga politik stagnan pada 16 orang atau 18,82% selama dua periode, mencerminkan kemajuan lambat dalam kesetaraan gender. Menurut teori representasi deskriptif, keterwakilan perempuan seharusnya mendekati proporsi populasi perempuan di masyarakat, tetapi angka ini jauh dari target kuota nasional 30%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan tidak hanya sedikit, tetapi mereka juga tidak memiliki cukup kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung kepentingan perempuan. Hambatan sistemik seperti patriarki dan kurangnya dukungan dari partai politik menghalangi keterwakilan yang efektif.

Budaya patriarki dan stereotip mengenai perempuan sebagai pemimpin memperkuat ketidaksetaraan ini. Akses yang terbatas terhadap pendidikan dan informasi politik juga menjadi penghalang partisipasi perempuan.

Meskipun jumlah perempuan tidak berubah, kontribusi mereka dalam pengambilan keputusan mungkin tidak semakin signifikan. Keberadaan perempuan tidak menjamin advokasi yang efektif jika struktur politik masih didominasi oleh nilai patriarkal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam jumlah dan kualitas.

Membangun infrastruktur politik yang inklusif dan memberikan akses pendidikan politik serta dukungan dari partai politik sangat diperlukan. Tanpa reformasi, partisipasi perempuan akan tetap marginal dan tidak berdampak pada kebijakan.

Keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan penting untuk menghadapi isu-isu yang berpengaruh pada mereka. Diperlukan dorongan kuat untuk pemberdayaan perempuan dalam politik agar mereka tidak hanya terwakili secara numerik tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan

### **KESIMPULAN**

Partisipasi politik perempuan di Indonesia sangat penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun perempuan menyusun lebih dari 51% dari total populasi, keterwakilan mereka dalam lembaga politik masih terbilang rendah, dengan angka 21,92% di DPR RI, 18,43% di DPRD Provinsi, dan 19,67% di DPRD Kabupaten/Kota. Berbagai faktor, seperti budaya patriarki, stereotip gender, serta minimnya dukungan politik, menjadi penghambat bagi keterlibatan perempuan dalam politik. Meskipun ada upaya melalui kebijakan dan penerapan kuota untuk meningkatkan partisipasi ini, masih dibutuhkan transformasi struktural dan perubahan budaya yang lebih mendalam untuk mencapai keadilan gender yang sesungguhnya.

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam arena politik tidak hanya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga membuat kebijakan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren partisipasi politik perempuan di Provinsi Lampung, sekaligus mendorong perempuan untuk lebih aktif berperan dalam berbagai aktivitas politik. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih setara dan mencerminkan keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aalaei, S., Ahmadi, M. A., & Aalaei, A. (2016). A Comparison of Multiple-Choice and Essay Questions In The Evaluation of Dental Students. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(5), 1674-1680.
- Aji W., S. B. (2019). UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DI KELAS IV SD N TINGKIR TENGAH 02. *Jurnal Basicedu*, 3(1), 47-52.
- Aji, B. S., & Winarno, M. E. (2016). Pengembangan Instrumen Penilaian Pengetahuan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Kelas VIII Semester Gasal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1(7), 1449-1463.
- Alfian, A., Aminah, N. S., & Sarwanto, S. (2015). Authentic Assessment Berbasis Scientific Approach sebagai Implementasi Kurikulum 2013 di SMP Kelas VII pada Materi Suhu dan Perubahannya. *Jurnal Inkuiri*, 4(3), 39-50.
- Amry, A. B. (2014). The Impact of Whatsapp Mobile Social Learning on The Achievement and Attitudes of Female Students Compared with Face to Face Learnin. *European Scientific Journal*, 10(22), 116-136.
- Anindya, E. F. (2019). Analisis Gerakan Literasi Sekolah Pada Pembelajaran Tematik. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 238-245.
- Arifin, A. H. (2012). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 1(1), 72-82.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arsyad, A. (2013). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Asrul, A. (2020). Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Bunaya*, 137-150.

- Badami, R., Vaezmousavi, M., Wulf, G., & Namazizadeh, M. (2011). Feedback After Good Versus Poor Trials Affects Intrinsic. *Physical Education, Recreation and Dance*, 82(2), 360-364.
- Baird, J.-A., Andrich, D., Hopfenbeck, T. N., & Stobart, G. (2017). Assessment and Learning: Fields apart? *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 24(3), 317-350.
- Banks, J. A. (2007). *Education Citizens in A Multicultural Society* (2nd ed.). New York: Teachers Collage Press.
- Barhoumi, C. (2015). The Effectiveness of WhatsApp Mobile Learning Activities Guided by Activity Theory on Students Knowledge Management. *Contemporary Educational Technology*, 6(3), 221-238.
- Gon, S., & Rawekar, A. (2017). Effectivity of E-Learning trough Whatsapp as a Teaching Learning Tool. *MVP Journal of Medical Science*, 4(1), 19-25.
- Hasbullah. (2014). *Media Pembelajaran Matematika*. Jakarta: Savittra Collage.
- Hatip, A. (2020). The Transformation Of Learning During Covid-19 Pandemic Towards the New Normal Era. *International Webinar on Education 2020*, (pp. 18-28).
- Hendriana, d. (2019). *Pembelajaran Inovatif matematika*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Infeksi Emerging*. (2020, July 26). (Kementrian Kesehatan RI) Retrieved July 26, 2020, from <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-26-juli-2020/#.XyJHeCgzbiW>
- Intan Chandra, N. S. (2018). Pengembangan Instrumen Sikap Sosial Tematik Siswa SD Kelas IV. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(4), 455-461.
- Jauhari, M. I. (2017). Taksonomi Bloom dan Implementasi Kurikulum Berbasis Multikultural. *JALIE: Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 1(1), 234-253.
- Jingga, A. A., Mardiyana, M., & Triyanto, T. (2018). Pendekatan dan Penilaian Pembelajaran pada Kurikulum 2013 Revisi 2017 yang mendukung Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa. *Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika*, 5(3), 286-299.
- Kamal, M. (2013). Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia Yang Majemuk. *Jurnal Al-Ta'lim*, 451-458.
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., . . . Feng, Z. (2020). Early Transmission Dynamic in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *The New England Journal of Medicine*, 1(1), 1-9.
- Mania, S. (2010). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran. *Lentera Pendidikan*, 13(1), 78-91.
- Martha, Z. D. (2018). E-Book Berbasis Mobile Learning. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 109-114.
- Masunah, J. (2011). Konsep dan Praktik Pendidikan Multikultural di Amerika Serikat dan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(4), 298-306.
- Muthoifin. (2015). Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara. *Intizar*, 21(2), 299-320.
- Prem, K., Liu, Y., Russell, T. W., Kucharski, A. J., Eggo, R. M., & Davies, N. (2020). The Effect of Control Strategies to Reduce Social Mixing on Outcomes of the COVID-19 epidemic in Wuhan, China : a modelling study. *Lancet Public Health*, 5(5), 1-10.
- Purwasito, A. (2003). *Komunikas Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Puspita, G. A. (2018). Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pebaca E-book Melalui Aplikasi Ipusnas. *Jurnal Kajian Pustaka dan Informasi*, 13-19.
- Rahardjo, B. (2002, May 21). *Rancangan ABC E-Book*. Retrieved from Budi Insan: <http://budi.insan.co.id/articles/ebook.pdf>.

- Rahman, F., Khalil, J. K., Jumani, N. B., Ajmal, M., Malik, S., & Sharif, M. (2011). Impact of Discussion Method on Students Performance. *International Journal of Business and Social Science*, 2(7), 84-94.
- Ramadanti, E. C. (2020). Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1053-1062.
- Rigianti, H. A. (2020). Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. *Elementary School*, 7(2), 297-302.
- Rina Tiya Lestari, E. P. (2018). E-book Interaktif. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 1(1), 71-76.
- Rosida, N. F. (2017). Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar E-Book Interaktif dalam Menumbuhkan Keterampilan Berpikir Kritis. *Jurnal Pembelajaran Fisika*, 5(1), 35-45.
- Rumapea, M. E. (2014). Makna Pendidikan Multikultural bagi Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 13-20.
- Rusman. (2011). *Model - Model Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusyan, T., Kusdinar, A., & Arifin, Z. (1989). *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remadja Karya.
- Sadeghi, M. (2019). A shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. *International Journal of Research in English Education*, 4(1), 80-88.
- Sandybayev, A. (2020). The Impact of E-Learning Technologies on Student's Motivation: Student Centered Interaction in Business Education. *International Journal of Research in Tourism and Hospitality*, 6(1), 16-24.
- Septy, L. (2015). Pengembangan Media Komik Pada Materi Peluang Kelas VIII. *Jurnal Dedaktik Matematika*. 2 (2), 16-26.
- Shahabadi, M. M., & Uplane, M. (2015). Synchronous and asynchronous e-learning styles and academic performance of e-learners. *Procedia Social and Behavioral Science*. 176, pp. 129-138. Elsevier Ltd.
- Shobirin, M. (2016). *Konsep Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suandito, B. (2017). Bukti Informal Dalam Pembelajaran Matematika. *Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(1), 13.
- Sulfemi, & W. (2019). *Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya*. Bogor: STKIP Muhammadiyah.
- Suparman, M. A. (2012). *Desain instruksional modern*. Jakarta: Erlangga.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 3(2), 11475-1156.
- Sutjipto. (2017). Implementasi Kurikulum Multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 1-21.
- Su'udiah, F. (2016). Pengembangan Buku Teks Tematik Berbasis Kontekstual. *Jurnal Pendidikan*, 1744-1748.
- Syifa, L. (2019). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Psikologi Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 3(4), 538-544.
- Taherdoost, H. (2016). Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research. *International Journal of Academic Research in Management*, 5(2), 18-27.
- Tavukcu, T., Arap, I., & Özcan, D. (2011). General Overview on Distance Education Concept. *Procedia Social and Behavioral Science*. 15. Elsevier Ltd.
- Tilaar, H. (2004). *Multikulturalisme*. Jakarta: PT. Grasindo.

- Tozoglu, D., Tozoglu, M. D., Gurses, A., & Dogar, C. (2004). The students' perceptions: Essay Versus Multiple-choice Type Exams. *Journal of Baltic Science Education*, 2(6), 52-59.
- Trianto. (2007). *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Trisna, G. A. (2017). Pengembangan Pendidikan Multikultural Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 1(2), 107-112.
- Wargadinata, W., Maimunah, I., Dewi, E., & Rofiq, Z. (2020). Student's Responses on Learning in the Early COVID-19 Pandemic. *Tadris : Journal of Education and Teacher Training*, 5(1), 141-153.
- Wasino. (2013). Indonesia: From Pluralism to Multiculturalism. *Paramita*, 23(2), 148-155.
- Yuliana, Y. (2020). Corona Virus diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literature. *Wellness ad Healthy Magazine*, 2(1), 187-192.
- Zaenal, A. (2017). Variasi Pembelajaran Matematika Di sekolah Rumah Bagi Para Homeschooler. *Lembaran Ilmu Kependidikan*, 36(2), 157-161.
- Zheng, J. (2020). SARS-CoV-2:an Emerging Coronavirus that Cause a Global Threat. *International Journal of Biological Science*, 16(10), 1678-1685.